

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemekaran wilayah di Indonesia merupakan pembentukan wilayah administrasi baru di tingkat Provinsi maupun Kota dan Kabupaten dari induknya. Landasan hukum pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 23 tahun 2014 bersisik tentang pemerintahan daerah. UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah atau suatu daerah secara khusus, namun di sebutkan dalam pasal 18B ayat 1 “Negara mengakui serta menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang di atur dengan Undang-undang” selanjutnya pada ayat 2 pasal yang sama tercantum kalimat “Negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan”.

Menurut peraturan pemerintah No 78 tahun 2007 pemekaran daerah/wilayah pecahan suatu pemerintah baik Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Menurut peraturan pemerintah No 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan serta kriteria pemekaran, penghapusan, dan juga penggabungan daerah, pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah merupakan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi pemekaran wilayah bisa pemekaran Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa. Sedangkan di dalam skripsi ini Pemekaran yang di maksud adalah Pemekaran Kabupaten/Kota. Dimana Kabupaten/Kota yang telah terjadi pemekaran adalah :

1. Kepulauan Mentawai Pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman (4 Oktober 1999).
2. Kota Pariaman Pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman (10 April 2002).
3. Kabupaten Pasaman Barat Pemekaran dari Kabupaten Pasaman (18 Desember 2003).
4. Kabupaten Dharmasraya Pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto Sijunjung (18 Desember 2003).
5. Kabupaten Solok Selatan Pemekaran dari Kabupaten Solok (18 Desember 2003).

Pemekaran wilayah secara insentif berkembang di Indonesia dianggap sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Setelah berjalan lebih dari lima tahun, banyak pihak ragu apakah tujuan pemekaran tersebut dapat tercapai atau tidak, meski saat ini pemekaran tidak dapat dielakkan lagi dalam situasi politik yang terjadi namun upaya membangun penilaian yang lebih obyektif akan bermanfaat dalam menentukan arah kebijakan pemekaran selanjutnya (Bappenas dan UNDP, 2008).

Di Provinsi Sumatera Barat sendiri dengan di keluarkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 yang di revisi menjadi Undang-undang No 32 tahun 2004, peluang tersebut di manfaatkan dengan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari yang kemudian menjadi pedoman bagi 8 (delapan) Kabupaten di Sumatera Barat untuk menyusun Perda yang mengatur tentang pemerintahan nagari sesuai dengan kultur budaya Minangkabau.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Ditjen Otonomi Daerah, Kementrian Dalam Negeri (2009), sebelum diberlakukannya otonomi daerah yaitu tahun 1998, jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia hanya 298 Kabupaten/Kota namun semenjak di sahkannya UU No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian di revisi menjadi UU No 32 tahun 2004 hingga desember 2008 telah terbentuk 215 daerah otonom baru yang terdiri dari 7 Provinsi 173 Kabupaten dan 35 Kota. Dengan demikian total jumlahnya mencapai 524 daerah otonom yang terdiri dari 33 Provinsi 398 Kabupaten dan 93 Kota. Di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten/ Kota yang Telah dimekarkan adalah dari 5 Kabupaten /Kota menjadi 10 Kabupaten/ Kota yang di mulai dari Oktober tahun 1999 sampai dengan Desember 2003. hasil pemekaran dari kabupaten/Kota sebelumnya, yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai Pemekaran Dari Kabupaten Padang Pariaman (4 Oktober 1999). Kota Pariaman Pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman (10 April 2002). Kabupaten Pasaman Barat Pemekaran dari Kabupaten Paman (18 Desember 2003). Kabupaten Dharmasraya Pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto Sijunjung ( 18 Desember 2003). Kabupaten Solok Selatan Pemekaran dari Kabupaten Solok (18 Desember 2003).

Terdapat beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik yaitu:

1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/ terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui

pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.

2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.

3. Penyerapan tenaga kerja lebih luas disektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan dibidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karna berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah.

Dengan beberapa alasan sehingga Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat perlu dimekarkan setelah memenuhi syarat dan aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi yang memiliki potensi yang besar untuk dapat di kembangkan pada tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi dan sumber daya yang berbeda-beda tiap daerahnya dan diharapkan pemerintah daerah dapat menggali dan meningkatkan sumber daya yang dimilikinya.

Perbedaan kondisi dan potensi dari masing-masing daerah terutama daerah yang baru mekar dalam melaksanakan desentralisasi membuat kesiapan setiap daerah berbeda-beda dan juga dalam mencapai keberhasilan pemekaran wilayah. Salah satu hambatan yang cukup serius yang sering dihadapi oleh pemerintah



Kabupaten/Kota baru hasil dari pemekaran daerah yaitu pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat dimana belum sesuai kualitas kerja aparatur dengan apa yang diinginkan masyarakat, kurang tersedianya tenaga manusia dalam hal ini sumber daya manusia yang ahli yang sesuai dengan bidang kerjanya. Proses pembangunan sebenarnya adalah suatu perubahan sosial budaya agar pembangunan menjadi poses yang dapat bergerak maju perlu dilakukan atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Dari banyak faktor yang di duga mempengaruhi keberhasilan pemekaran wilayah penulis membatasi hanya menganalisis faktor Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) dan Tingkat Kemiskinan.

Dampak pemekaran terhadap pendapatan yaitu untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di dalam suatu wilayah agar dapat mengejar ketinggalannya dengan daerah yang lain. Dengan pemekaran diharapkan masyarakat merasakan peningkatan pelayanan memudahkan untuk mengakses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga kesejahteraan akan tercapai. Salah satu ukuran kesejahteraan adalah pendapatan. Makin tinggi pendapatan seorang penduduk maka makin leluasa penduduk tersebut memenuhi semua kebutuhannya dan berarti semakin sejahtera oleh karna itu PDRB masih kurang tepat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jadi merata tidak terlihat penduduk yang kaya ataupun yang miskin. Tinggi rendahnya PDRB suatu daerah di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu besaran PDRB yang dihasilkan suatu daerah serta jumlah penduduk daerah tersebut. Perbandingan PDRB suatu daerah dengan daerah lainnya mencerminkan berbagai daerah dalam upaya maningkatkan

pendapatan penduduknya. Makin tinggi PDRB suatu daerah menunjukkan keberhasilan upaya daerah dalam meningkatkan pendapatan penduduknya. Dampak pemekaran terhadap kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan merupakan inti dari masalah pembangunan dan merupakan tujuan utama kebijakan pembangunan

Sekalipun di daerah-daerah pemekaran di Indonesia adanya dampak pemekaran wilayah sesuai dengan apa yang diteliti oleh Ida Ayu Purba Riani dan M. Pudjihardjo (2012) di Provinsi Papua bahwa dampak pemekaran wilayah pada dasarnya memberikan dampak terhadap tingkat kesenjangan masyarakat di Provinsi Papua terhadap kenaikan pendapatan perkapita, penurunan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan pembangunan wilayah. Jika dibandingkan dengan Sumatera Barat bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap pendapatan dan kemiskinan. Oleh karena itu hal tersebut membuat peneliti tertarik kembali untuk menulis skripsi mengenai “ Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat ”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang judul diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap pendapatan dan kemiskinan di Kabupaten atau Kota yang dimekarkan di Sumatera Barat (Kepulauan Mentawai, Kota Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Untuk mengetahui Bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap pendapatan dan kemiskinan di Kabupaten atau Kota yang dimekarkan di Sumatera Barat (Kepulauan Mentawai, Kota Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Sumatera Barat untuk meninjau kembali perkembangan ekonomi sesuai dengan rencana struktur yang telah ditetapkan.
2. Sebagai bahan atau rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait kajian pemekaran wilayah.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yang mengkaji pemekaran wilayah sebelum dan sesudah di Sumatera Barat dengan melihat keterkaitan antara pendapatan dan kemiskinan.

### **1.6 Sistematika Laporan Penelitian**

Sistematika penulisan yang di gunakan dalam usulan penelitian tentang Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan dan Kemiskinan di bagi dalam enam bab.

## **BAB I Pendahuluan**

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika laporan penelitian.

## **BAB II Landasan Teori**

Dampak pemekaran, pendapatan, dan kemiskinan, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis.

## **BAB III Metodologi Penelitian**

Terdiri dari data dan sumber data, populasi dan sampel, metode analisis dan devinisi operasional variable.

## **BAB IV Gambaran Umum Daerah Penelitian**

Terdiri dari gambaran umum daerah, perkembangan pendapatan, perkembangan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan tingkat kemiskinan

## **BAB V Temuan Empiris dan Implikasi Kebijakan**

Terdiri dari hasil dari semua pengujian data menggunakan uji statistik non parametrik

## **BAB VI Kesimpulan dan Saran**

